



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 1639-1648

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Dana Desa dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus Provinsi Aceh)

Yunidar Purnama Sari¹, Okta Rabiana Risma^{2✉}

Universitas Teuku Umar

Email: oktarabiana.risma@utu.ac.id^{2✉}

Abstrak

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi panel. Dengan kemiskinan sebagai variabel dependen dan dana desa serta PDRB sebagai variabel independen, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020 hingga 2023, dengan kemiskinan sebagai variabel dependen, dan Dana Desa serta PDRB sebagai variabel independen. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial maupun simultan, Dana Desa dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi dana desa dan pertumbuhan PDRB belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Dana Desa, PDRB*

Abstract

This study employs a quantitative method with panel regression. Using poverty as the dependent variable and Village Fund as well as Gross Regional Domestic Product (PDRB) as independent variables, the data are sourced from the Central Statistics Agency (BPS) for the period from 2020 to 2023. The results reveal that both partially and simultaneously, Village Fund and PDRB have a positive and significant impact on poverty levels. Therefore, it can be concluded that the implementation of Village Fund and PDRB growth has not yet been effective in reducing poverty levels in Aceh Province.

Keywords: *Poverty, Village Funds, GRDP*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas masyarakat hukum yang memiliki kewenangan terbatas untuk mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan adat istiadat yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kepala Desa dan perangkat desa lainnya berfungsi sebagai pihak yang melaksanakan kewenangan tersebut. Setiap desa mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN, yang kemudian disalurkan melalui APBD kabupaten/kota. Program dana desa mulai diperkenalkan pada tahun 2015 berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Penyaluran dana ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Alokasi dana desa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, baik melalui program BLT maupun bantuan sosial lainnya, meningkatkan infrastruktur desa, dan memperbaiki layanan bagi masyarakat setempat.

Menurut (Fahmi Ginanjar et al., 2018), masalah kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan strategi yang efektif dalam penanggulangannya. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia antara lain rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya akses pekerjaan, keterbatasan modal untuk usaha mikro, dan rendahnya pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses pekerjaan, program kredit usaha mikro, dan program pemberdayaan perempuan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia secara signifikan

Dana desa memberikan kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan di tingkat desa, yang berperan besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah (Adzam et al., 2024). Program dana desa ini dirancang untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dengan mengalokasikan dana secara langsung kepada desa-desa, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produktif dan pembangunan infrastruktur. Setiap tahunnya, dana desa mengalami peningkatan, yang membuka peluang bagi setiap desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya dana desa, pemerintah desa memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi masalah lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti menyediakan fasilitas umum yang lebih baik, meningkatkan layanan kesehatan, serta mengembangkan sektor ekonomi lokal. Selain itu, keberadaan dana desa juga mempercepat proses penanggulangan kemiskinan dengan menyediakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara keseluruhan.

Kebijakan ini tidak hanya mendorong pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi desa, sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan lebih tepat.

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 23 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana desa kepada desa-desa melalui anggaran APBD sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan. Pada tahun 2024, alokasi dana desa di Aceh mengalami kenaikan menjadi Rp.4,79 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp.4,76 triliun. Dana desa ini bersumber dari APBN dan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan komunitas lokal (Dethan, 2019). Dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, setiap desa melaksanakan musyawarah desa sebagai forum utama untuk mengumpulkan dan menyaring aspirasi dari masyarakat, dengan tujuan agar hasil pembangunan dapat langsung dirasakan oleh warga desa. Proses musyawarah desa ini memiliki peran yang begitu penting karena menjadi wadah dalam memantau setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Selain itu, melalui partisipasi aktif warga dalam musyawarah desa, diharapkan dapat tercipta transparansi dalam penggunaan dana desa, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, yang pada akhirnya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan keberhasilan program yang dijalankan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diambil merupakan metode regresi data panel yang mempunyai tiga model yaitu *Pooled OLS/ Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect*. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan dana desa serta PDRB sebagai variabel independen pada 23 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh dari tahun 2020-2023 yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Adapun persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat kemiskinan di proxy dengan jumlah penduduk miskin (jiwa)

DD = Dana desa (Rupiah)

PDRB = produk domestik bruto di proxy dengan laju pertumbuhan PDRB (persen)

a = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien regresi

i = tahun

t = kabupaten/kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model

Langkah awal dalam analisis data panel pada suatu penelitian adalah memilih model regresi data panel yang akan digunakan. Pemilihan model ini dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Jika satu model terpilih dua kali berdasarkan hasil dari ketiga uji tersebut, maka model yang dipilih tersebut akan digunakan dalam penelitian Syarifudin (2020). Berikut ini disajikan hasil uji pemilihan model untuk analisis data panel.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Test			
Equation : Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	492.995225	(22,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	468.556715	22	0.0000

Sumber : Data diolah (2024).

Uji Chow dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Common Effect Model (CEM). Pada Tabel 1. Hasil Uji Chow di atas diperoleh p-valuenya adalah $0,0000 < 0,05$ yang berarti model analisis terbaik menurut uji Chow adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects: Hausman Test			
Equation :Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq, Statistic	Chi-Sq, d.f.	Prob.
Cross-section random	30.710977	2	0.0000

Sumber : Data diolah (2024).

Uji test Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). *P-value* pada Tabel 2. Hasil Uji Hausman di atas diperoleh adalah $0,0000 < 0,05$. Model analisis terbaik berdasarkan hasil Uji Hausman adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil regresi diperoleh bahwa pada uji chow dan uji hausman terpilih model FEM sebanyak dua kali, maka uji Langrange Multiplier (LM) tidak diperlukan lagi. Menurut Syarifudin (2020), model terbaik yang dapat diterapkan dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel adalah model yang terpilih sebanyak dua kali setelah dilakukan pengujian. Model analisis terbaik yang telah dilakukan adalah FEM (*Fixed Effect Model*).

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

	DD	PDRB
DD	1.000000	-0.097821
PDRB	-0.097821	1.000000

Sumber: Data diolah, 2024.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dibuktikan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel pada penelitian ini memiliki nilai dibawah 0,85. Hal ini menunjukkan tidak terjadi gejala multikolonieritas antara variabel penelitian.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.383590	1.105681	-0.346927	0.7297
DD	3.86E-09	5.12E-09	0.753767	0.4536
PDRB	-0.016578	0.018433	-0.899396	0.3717

Sumber : Data diolah (2024).

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh *p-value* variabel DD dan PDRB sebesar 0.4536 dan 0.3717 > 0.05, sehingga dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas variabel independen berada di atas tingkat signifikan 0,05 yang artinya variabel dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.40585	2.378102	9.001233	0.0000
DD	6.56E-08	1.10E-08	5.960374	0.0000
PDRB	0.081559	0.039645	2.057233	0.0436
Effects Specification				
Cross Section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999498	Mean dependent var	35.46489	
Adjusted R-squared	0.999318	S.D. dependent var	24.25183	
S.E. of regression	0.633252	Akaike info criterion	2.150485	
Sum squared resid	26.86752	Schwarz criterion	2.835753	
Log likelihood	-73.92230	Hannan-Quinn criter.	2.427065	
F-statistic	5558.381	Durbin-Watson stat	2.178493	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 5 menyajikan hasil analisis regresi linear berganda, dengan kemiskinan sebagai variabel dependen dan PDRB serta dana desa sebagai variabel independen. Berdasarkan tabel tersebut, nilai Adjusted R-squared tercatat sebesar 0,999318, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan 99% dari variasi pada variabel dependen, sementara 1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa baik secara individual

maupun simultan, variabel dana desa dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi dana desa belum berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Aceh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiningsih (2018), yang menyatakan bahwa dana desa masih belum efektif dalam penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dana yang belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga tidak dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat miskin di desa. Akibatnya, potensi untuk meningkatkan pendapatan mereka menjadi terbatas. Dana Desa dapat meningkatkan kemiskinan jika penggunaannya tidak tepat sasaran atau tidak dikelola dengan baik. Meskipun Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan dasar, realisasi program yang kurang efektif dapat menimbulkan hasil yang sebaliknya. Ketika dana ini tidak dikelola secara transparan atau digunakan untuk proyek yang tidak menyentuh kebutuhan utama masyarakat miskin, manfaat yang diharapkan tidak akan tercapai. Misalnya, jika sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur besar tanpa mempertimbangkan dampak langsung pada masyarakat miskin, maka hasilnya adalah ketidakmerataan manfaat. Selain itu, adanya korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum aparat desa dapat mengurangi alokasi untuk program-program pengentasan kemiskinan dan menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kondisi seperti ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi di desa dan menciptakan kemiskinan struktural, di mana sebagian masyarakat tetap berada dalam kemiskinan karena tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap kesempatan ekonomi yang dihasilkan oleh program Dana Desa.

Kebijakan pemberdayaan dana desa telah diimplementasikan sebagai upaya dalam menangani permasalahan yang ada di desa-desa. Permasalahan dana desa menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemampuan kepada desa dalam mengelola dana yang dimiliki secara mandiri. Implementasi kebijakan tersebut memiliki urgensi yang tinggi karena desa merupakan bagian penting dalam pembangunan negara. Dengan adanya kebijakan pemberdayaan dana desa, diharapkan desa dapat memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan (Putra Minang et al., 2021). Implementasi kebijakan pemberdayaan dana desa memiliki urgensi yang

penting untuk dilakukan. Pemberdayaan dana desa memiliki tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan menjadi sangat penting karena merupakan tahapan yang mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Melalui implementasi kebijakan, dana desa dapat digunakan dengan efektif dan efisien, serta dapat merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan dana desa akan memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. (Pembangunan et al., 2020).

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, sebagaimana diungkapkan dalam studi (Faadila & Dinar, 2022). Dalam konteks ini, peningkatan PDRB, yang umumnya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat, justru diiringi dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan melalui teori kemiskinan relatif yang diutarakan oleh Miller (dalam Arsyad, 2010), yang menyatakan bahwa garis kemiskinan akan bergerak mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Saat ekonomi mengalami pertumbuhan yang mendorong inflasi, biaya hidup dan harga kebutuhan dasar ikut meningkat. Bagi sebagian besar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, kenaikan tersebut berarti beban hidup yang makin berat, sehingga mereka tetap berada di bawah garis kemiskinan meskipun terjadi peningkatan ekonomi. Dalam hal ini, teori kemiskinan relatif menyoroti bahwa kemiskinan bukan sekadar masalah kekurangan pendapatan secara absolut, tetapi juga ketimpangan yang terjadi akibat tidak meratanya distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Susanti (2013) yang menekankan bahwa kenaikan PDRB tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa kasus, justru terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB tidak selalu mencerminkan kesejahteraan yang merata di semua lapisan masyarakat. Alih-alih mengurangi kemiskinan, peningkatan PDRB yang tidak diiringi dengan kebijakan redistribusi yang tepat justru dapat memperburuk jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok ekonomi atas dapat menikmati keuntungan yang lebih besar dari hasil pertumbuhan, sementara kelompok miskin cenderung tertinggal

karena kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi. Fenomena ini menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap kebijakan yang memastikan pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada perbaikan taraf hidup masyarakat miskin, bukan hanya pada peningkatan angka-angka makroekonomi yang tidak selalu mencerminkan kesejahteraan secara luas.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa baik secara parsial maupun simultan dana desa dan PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara keseluruhan memang tidak dapat dipungkiri bahwa alokasi dana desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini salah satunya terjadi karena adanya ketimpangan dan tidak tepat sasaran dana desa yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnia, L. (2018). Pengaruh Dana Desa Dalam Pengetasan Kemiskinan di Indonesia. Universitas Brawijaya Malang.
- Andriyani, D. (2019). Analisis Efektifitas Dana Desa T
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan (5th ed.). STIM YKPN
- Adzam, M., Usnitayati, H., Prastyana, A. A., Bernantus, N. A., & Lamora, A. S. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui
- Basuki, A.T., & Yuliadi, I (2014) Electronic Data Processing (SPSS 15 dan Eviews 7). Danisa Media.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. 2024. <https://aceh.bps.go.id/id>
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu pendekatan Teoritis. Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, 7(1),15–19.
- DN Fadhillah. (2023). Implementasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dihubungkan dengan Permensos nomor 1 tahun 2018 dan asas kemanfaatan hukum.
- Faadila, D., & Dinar, D. (2022). Pengaruh PDRB, IPM Dan Kapasitas Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia : Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2019. Dipenogoro Journal Of Economics, 4(4), 9–19.
- Martowardojo, A. D. (2014). Satu Dawarsa Implementasi Otonomi Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. Yogyakarta: 2-4 Oktober 2014 Kongres ISEI ke-XVIII.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T.P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja H., Sirait, R.Y. M., Tobing, L., & Ria, C. E(2021). Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews, 1.ed.Madenatera

- Sari, M. I. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Setyaningsih, I. (2018). Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. Jurnal Untan.
- Susanti, S. (2013). Pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. Jurnal Matematika Integratif, 1412-6184.